



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Akhir Masa Jabatan Walikota Tangerang Tahun 2013

I. Latar Belakang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat, yang secara teknis penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud:

- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD-AMJ) Tahun 2013 merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2013.

B. Tujuan:

- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2013 untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dari masyarakat berupa tanggapan atau saran secara lisan dan/atau tertulis dengan tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

III. Ruang lingkup:

1. Substansi/Materi:

Muatan ILPPD merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. **Urusan Desentralisasi**, yang berupa penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. **Tugas Pembantuan**, yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

- **Tugas Umum Pemerintahan**, yang berupa kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai permasalahan dan solusinya.

2. Wilayah:

ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kota Tangerang.

3. Waktu:

ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2013.

IV. Gambaran Umum Daerah

A. Kondisi Geografis

Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993. Berada di bagian Timur Provinsi Banten, merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Tahun 2011, luas wilayah Kota Tangerang adalah ± 184.24 km² (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, seluas ± 19.69 km²).

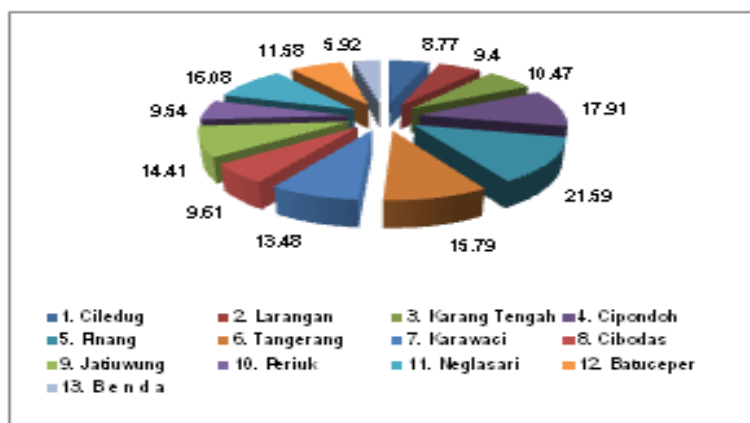
Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Wilayah Kota Tangerang, berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Serpong dan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan DKI Jakarta;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

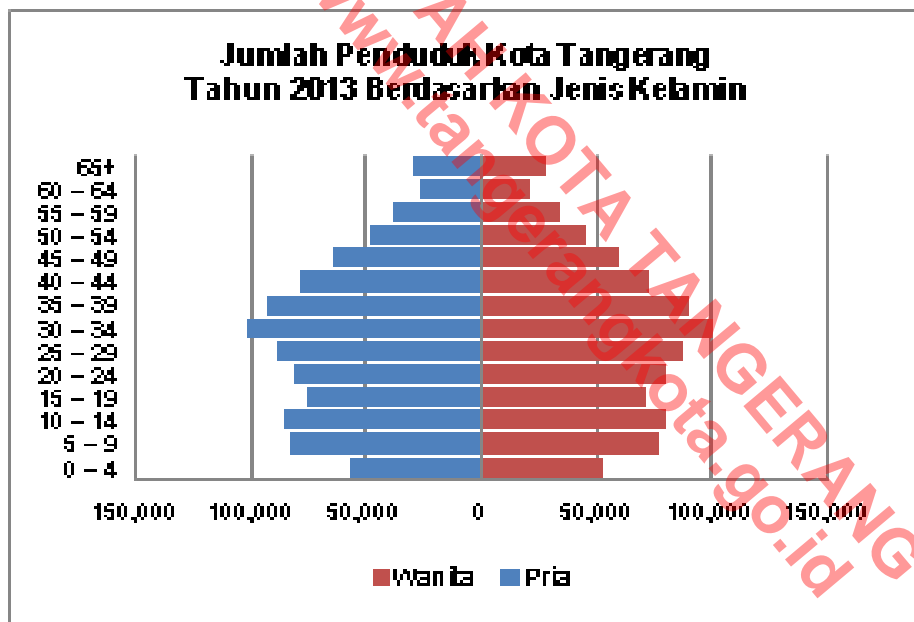
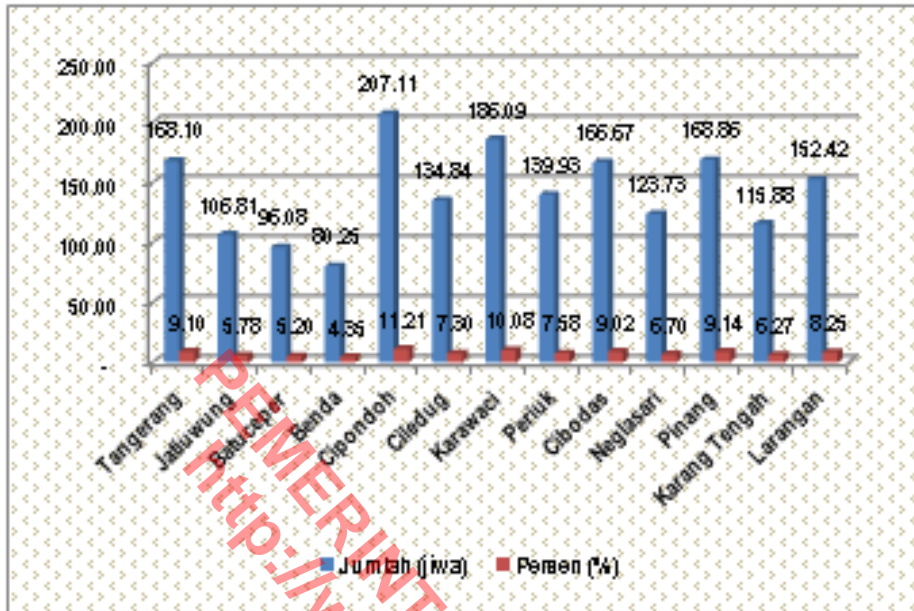
B. Wilayah Administrasi Kota Tangerang

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, secara administrasi Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Dimana total jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 965 dan Rukun Tetangga sebanyak 4.768. Distribusi luas wilayah dan jumlah kelurahan berdasarkan wilayah kecamatan seperti pada gambar berikut:



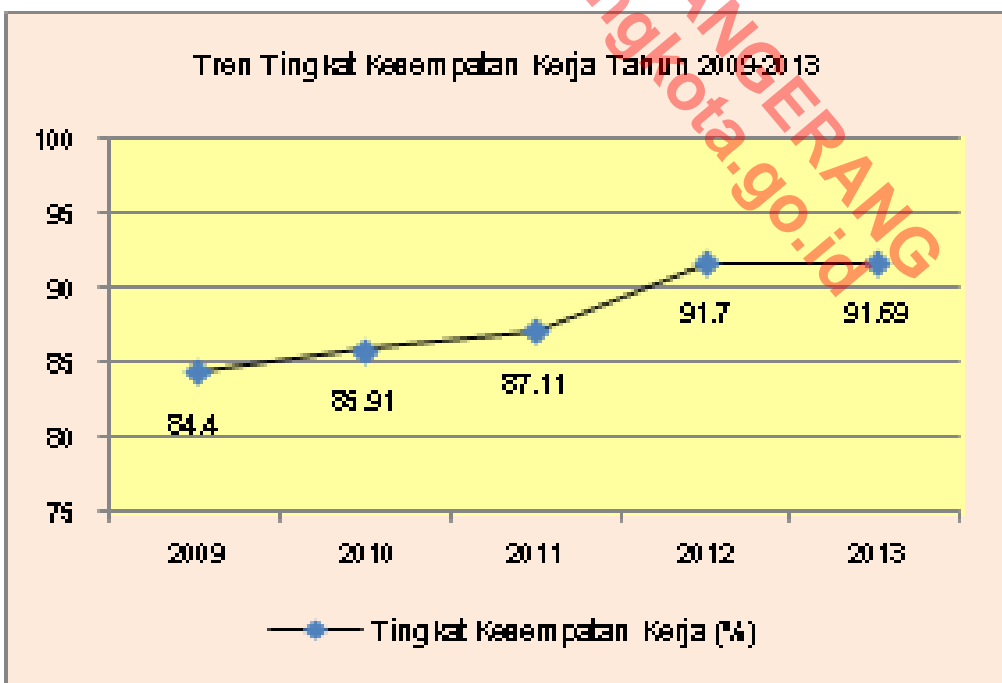
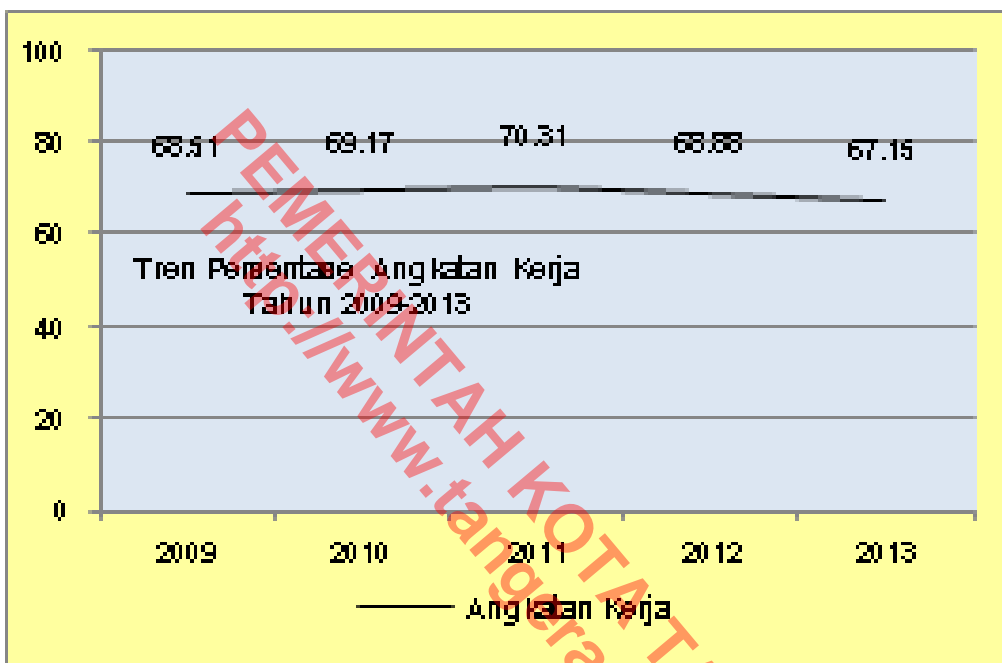
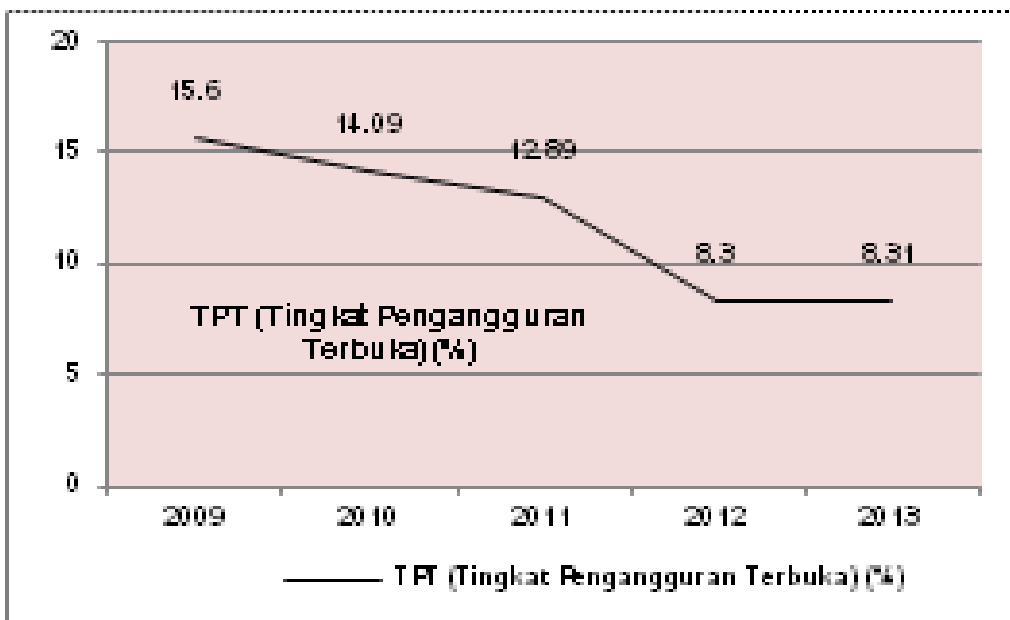
C. Gambaran Umum Demografis

Gambaran umum demografis Kota Tangerang bisa dilihat melalui berbagai data/informasi yang terkait dengan kependudukan, yaitu antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, dll, seperti terlihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Jumlah Penduduk Kota Tangerang relatif seimbang antara perempuan dengan laki-laki dengan bentuk piramida penduduk yang mencerminkan adanya potensi penduduk produktif (20-50 tahun) yang tinggi serta harapan hidup yang meningkat. Sementara itu, dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk selama Tahun 2013 terlihat bahwa Kecamatan Cibodas dan Tangerang masing-masing merupakan kecamatan yang mempunyai LPP tertinggi dan terendah, Kecamatan Cipondoh dan Benda masing-masing merupakan kecamatan yang paling banyak dan paling sedikit penduduknya, serta Kecamatan Cibodas dan Jatiuwung masing-masing merupakan kecamatan yang paling padat dan paling jarang penduduknya. Hal ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah tentang fungsi wilayah baik sebagai hunian/perumahan maupun sebagai kawasan industri daerah.

Selain itu, perkembangan kependudukan Kota Tangerang jika dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangannya selama Tahun 2013 bisa dilihat pada gambar berikut ini:

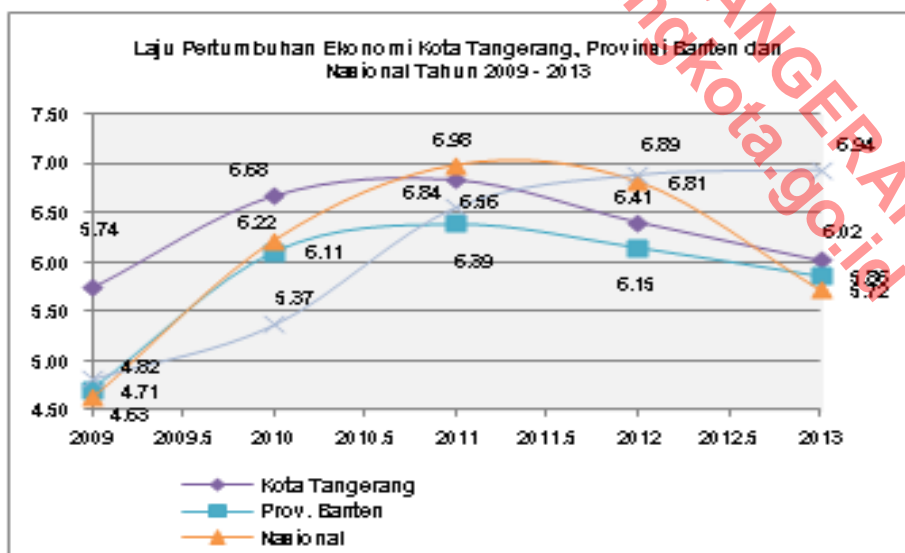
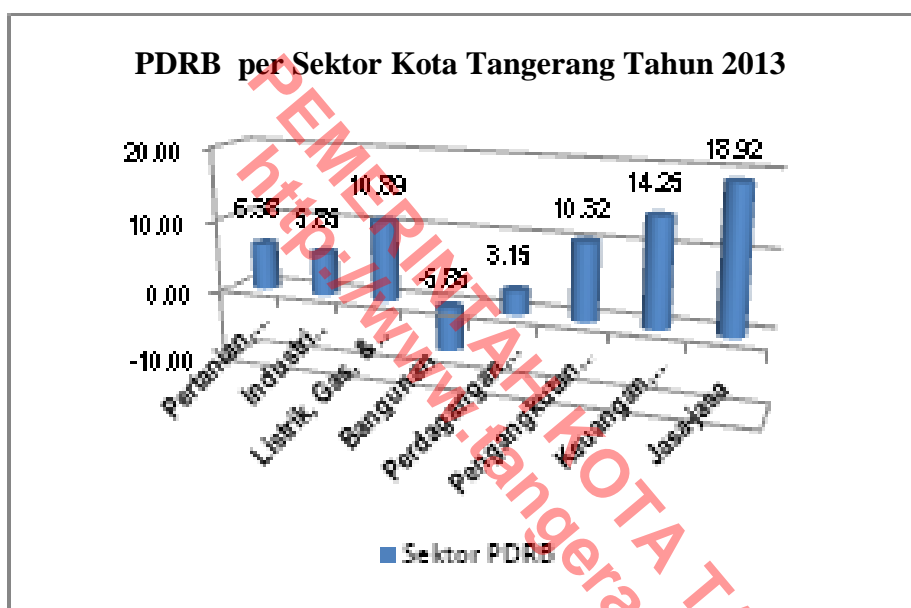


Berdasarkan gambar di atas, pada Tahun 2013 secara umum ketenagakerjaan di Kota Tangerang relatif stabil (tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan). Hal ini terkait dengan kondisivitas Kota Tangerang yang relatif aman dan terkendali. Dengan melihat hal tersebut, maka masih memungkinkan adanya kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai sektor usaha di Kota Tangerang.

D. Gambaran Perekonomian Daerah

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah.

Pembangunan perekonomian di wilayah Kota Tangerang beserta pertumbuhan dan perkembangannya yang didasarkan pada berbagai indikator perekonomian daerah (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pembuan Sektoral PDRB, Laju Inflasi Harga, dll.) selama Tahun 2013 bisa dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada Tahun 2013 sebesar 6.02% lebih tinggi dari LPE Provinsi Banten (5.86) dan LPE Nasional (5.72%). Jika dilihat dari kecenderungannya, LPE Kota Tangerang dari Tahun 2009-2013 relatif stabil seiring dengan LPE Provinsi Banten dan LPE Nasional. Pertumbuhan sektor terbesar dan terkecil adalah sektor Jasa-jasa (18.92%) dan Sektor Bangunan (-5.85%), sedangkan kontribusi terbesar dan terkecil adalah sektor Perdagangan, Jasa, dan Restoran (30.70%) dan Sektor Pertanian (0.15%). Inflasi Kota Tangerang pada Tahun 2013 sebesar 10.02% yang merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun namun masih di

bawah perkiraan RPJMD (10.12%).

Mengenai investasi, berikut disajikan tabel perkembangan investasi di Kota Tangerang pada PMDN dan PMA selama Tahun 2009-2013 yang secara umum relatif meningkat setiap tahunnya.

Tabel Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Kota Tangerang Tahun 2009–2013

Tahun	Uraian		Perusahaan		Jumlah
			PMA	PMDN	
2009	Jumlah Perusahaan		257	141	398
	Investasi	US\$	2.720.702.000	-	2.720.702.000
		Rupiah	2.427.805.561.250	9.353.993.711.822	11.781.799.273.072
2010	Jumlah Perusahaan		266	141	407
	Investasi	US\$	2.720.352.000	-	2.720.352.000
		Rupiah	2.535.006.927.797	9.353.993.711.822	11.889.000.639.619
2011	Jumlah Perusahaan		282	141	423
	Investasi	US\$	2.763.119.580	-	2.763.119.580
		Rupiah	3.083.660.459.698	9.353.993.711.822	12.437.654.171.520
2012	Jumlah Perusahaan		82	14	100
	Investasi	US\$	3.103.973.688	-	3.103.973.688
		Rupiah	3.083.660.459.698	14.372.979.417.648	17.456.639.877.346
2013	Jumlah Perusahaan		31	13	44
	Investasi	US\$	91.133.000	-	91.133.000
		Rupiah	2.211.242.181.636	318.814.365.275	2.530.056.546.911

Sumber: Subbag. Penanaman Modal, Bagian Perekonomian, Setda Kota Tangerang, 2013

V. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013

Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah (Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah)

Arah kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2009-2013, diarahkan untuk pencapaian visi dan misi daerah berupa:

VISI:

"Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman Serta Pendidikan Yang Akhlakul Karimah"

Misi:

1. Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik; dan
5. Mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Upaya pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan melalui 53 strategi serta 82 kebijakan dengan 25 sasaran pokok pembangunan.

VI. Pengelolaan Keuangan Daerah

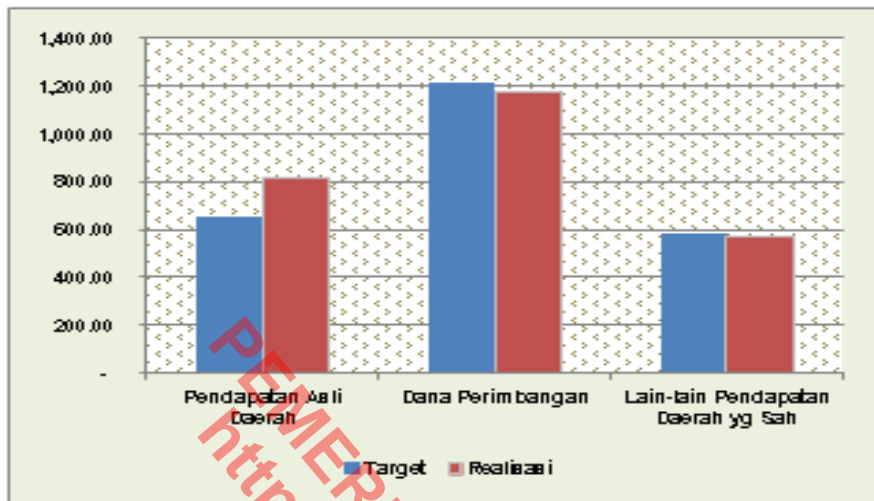
Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut disampaikan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk pada Tahun Anggaran 2013.

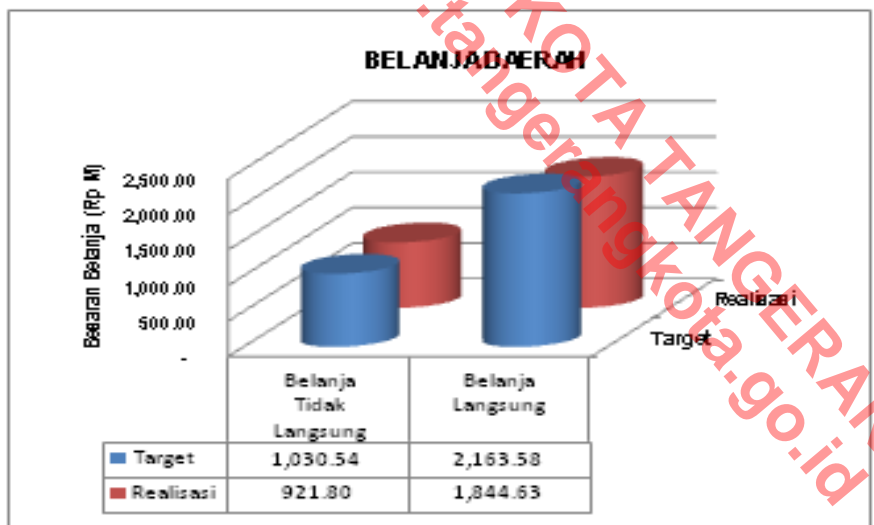
1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2013.



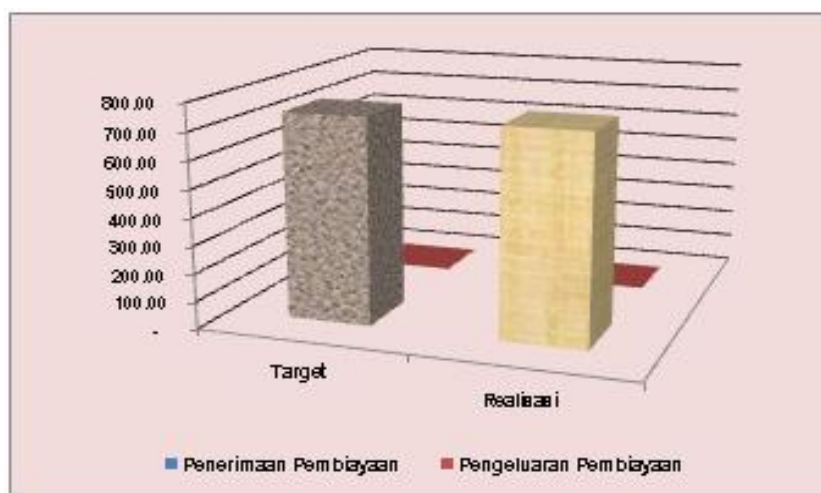
2. Belanja Daerah

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada Tahun Anggaran 2013.



3. Pembiayaan

Berdasarkan arah kebijakan pembiayaan daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2009-2013.



VII. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

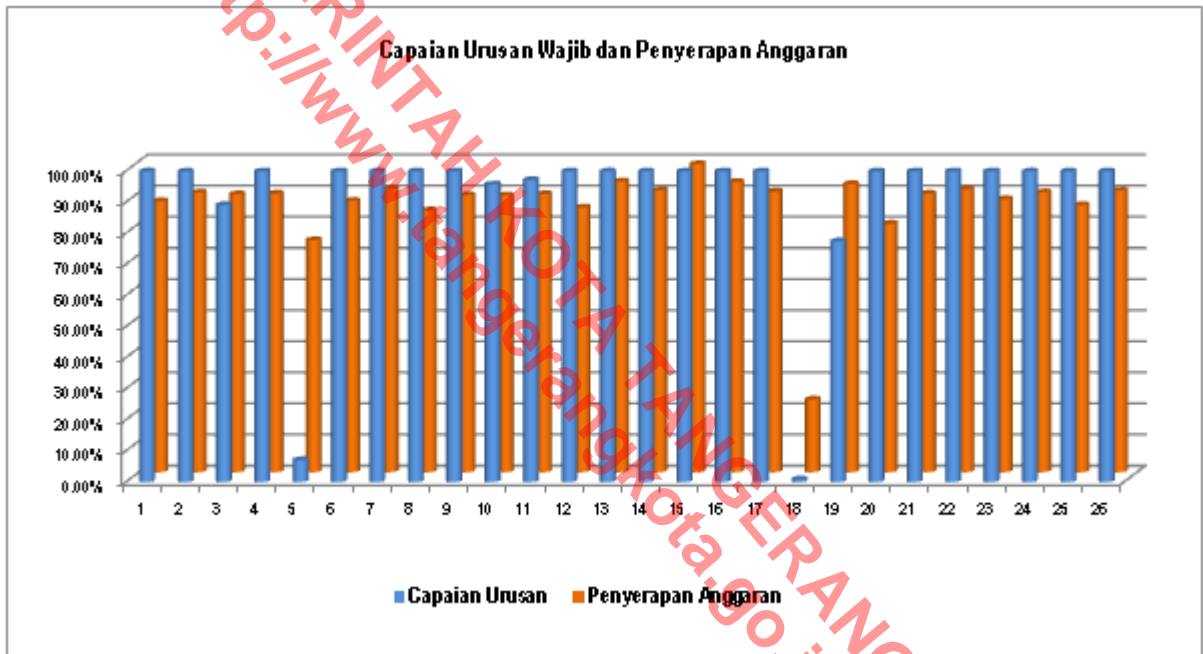
A. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009–2013 berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang diterjemahkan ke dalam pembagian urusan pemerintahan (urusan wajib dan pilihan), serta program/kegiatan pembangunan beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD Kota Tangerang merupakan turunan (derivasi) dan operasionalisasi tahunan dari RPJMD Kota Tangerang yang memuat rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari program/kegiatan dan pagu anggaran beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 1 tahun.

Dalam rangka pencapaian visi misi dan 25 sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009-2013, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2013, melaksanakan 31 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 5 urusan pilihan, dengan jumlah program sebanyak 239 program dan 1.347 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.194.123.620.842,22

Upaya-upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dikelompokkan dalam urusan-urusan wajib dan pilihan seperti yang terangkum sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013



II. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013



Berdasarkan gambaran di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah Kota Tangerang pada Tahun 2013 sebesar 91.06%, serta rata-rata penyerapan anggarannya sebesar 86.60%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kota Tangerang pada Tahun 2013 sebesar 100%, dan rata-rata penyerapan anggarannya sebesar 89.11%. Dengan demikian, maka secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tangerang pada Tahun 2013 relatif berhasil, dengan tingkat efisiensi penyelenggaraan urusan wajib sebesar 105.15% serta tingkat efisiensi penyelenggaraan urusan pilihan sebesar 112.22%.

B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Tangerang menerima berbagai program/kegiatan dari anggaran tugas pembantuan Pemerintah Pusat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Dinas Pertanian

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Pertanian pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Program dan Kegiatan	Tahun	Pemberi Tugas	Dasar Hukum
1.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	2013	Ditjen Hortikultura	No.DIPA : 018.04.4.299484/2013 Tanggal 5 Desember 2012 dengan Anggaran Rp1.170.000.000,00

Sumber: Data Olahan Dinas Pertanian Kota Tangerang Tahun 2013

Dinas Kesehatan

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Kesehatan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Tahun	Pemberi Tugas	Dasar Hukum
1.	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	2013	Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak Kementerian Kesehatan RI	No.DIPA: 024-03.4.299487/2013 Tanggal

Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2013

C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara optimal. Tugas tersebut terfokus kepada kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban serta mensejahterakan masyarakat. Pelaporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 meliputi tugas umum sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Pengelolaan Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah;
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan yaitu penyelenggaraan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

D. Penghargaan yang diterima Kota Tangerang

Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi, pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, antara lain:

No.	Penghargaan/Kategori	Pemberi
1.	Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award	Kementerian Dalam Negeri
2.	Kinerja pemerintahan daerah terbaik nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kementerian Dalam Negeri
3.	<i>Indonesia Digital Society Award (IDSA)</i> Tahun 2013 karena berhasil membangun dan mengembangkan sistem digital dalam meningkatkan pelayanan public	Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
4.	Anugerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam (6) kali berturut-turut	BPK RI
5.	Penghargaan Adipura Kencana Tahun 2013 sebagai Kota Metropolitan Terbersih Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
6.	Penghargaan Langit Biru	Kementerian Lingkungan Hidup
7.	Indonesia Road Safety Award (IRSA)	Kementrian Perhubungan
8.	Penghargaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	LKPP
9.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Kementrian Komunikasi dan Informasi

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2013, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.